
AIDIL AKBAR, M.PD

**BAB
6**



**PENGELUARAN KONSUMSI MASYARAKAT
DAN
PENGELUARAN PEMERINTAH**

**PENGELUARAN KONSUMSI MASYARAKAT DI INDONESIA DAN
PENGELUARAN PEMERINTAH SEBAGAI INDIKATOR PENINGKATAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**

A. Tujuan pembelajaran

1. Ketepatan menganalisis tren pengeluaran konsumsi masyarakat di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, termasuk perubahan dalam pola pengeluaran untuk berbagai barang dan jasa.
2. Ketepatan menganalisis komposisi pengeluaran pemerintah di Indonesia, termasuk alokasi dana untuk sektor-sektor seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program sosial.
3. Ketepatan mengidentifikasi dampak kebijakan pengeluaran pemerintah terhadap peningkatan kesejahteraan Masyarakat.

B. Uraian Materi

1. Pengertian Pengeluaran Konsumsi Masyarakat

Pola konsumsi penduduk suatu negara dapat mencerminkan kondisi sosial ekonomi daerah atau negara tersebut. Data mengenai komposisi pengeluaran rumah tangga bisa menjadi indikator untuk menilai tingkat kesejahteraan penduduk. Semakin rendah persentase pengeluaran untuk makanan dari total pengeluaran, semakin baik tingkat perekonomian penduduk di wilayah tersebut.

Selain masalah konsumsi, faktor-faktor seperti sosial ekonomi dan budaya masyarakat juga berperan dalam membentuk pola konsumsi penduduk. Faktor-faktor ini dapat digunakan sebagai dasar perencanaan program dan kebijakan pemerintah dalam pengambilan keputusan. Penyajian pola konsumsi di tingkat nasional membantu dalam analisis kebutuhan konsumsi penduduk secara lebih terperinci, sehingga kita dapat mengetahui komoditas yang lebih sering atau jarang dikonsumsi.

Menurut teori Keynes, salah satu faktor utama yang menentukan kinerja ekonomi suatu negara adalah pengeluaran agregat, yang mencakup belanja masyarakat untuk barang dan jasa. Keputusan konsumsi rumah tangga memiliki dampak yang signifikan pada perilaku ekonomi secara keseluruhan, baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Dalam jangka pendek, fluktuasi dalam konsumsi memiliki pengaruh yang besar pada fluktuasi

ekonomi, sementara dalam jangka panjang, keputusan konsumsi rumah tangga akan memengaruhi variabel makroekonomi lainnya.

Konsumsi, biasanya menyumbang sekitar 50-75% dari Produk Domestik Bruto (PDB), sehingga konsumsi rumah tangga memainkan peran kunci dalam menentukan fluktuasi aktivitas ekonomi dari waktu ke waktu. Hubungan antara konsumsi individu dan pendapatan bersifat proporsional, yang berarti semakin tinggi pendapatan seseorang, semakin besar kemungkinan mereka akan mengonsumsi lebih banyak.

Di Indonesia, konsumsi juga memiliki peran yang sangat dominan dalam perekonomian. Kontribusi konsumsi terhadap PDB Indonesia cukup besar, berkisar antara 57,7% hingga 73,9%. Namun, ada fluktuasi dalam besaran konsumsi selama periode tertentu, seperti yang terjadi antara tahun 1999 hingga 2008. Pada tahun 2001, kontribusi konsumsi mengalami penurunan signifikan, namun kemudian meningkat seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk Indonesia dan peningkatan kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa. Contohnya, selama pandemi COVID-19, ketika pendapatan banyak orang terpengaruh, pengeluaran konsumen juga mengalami penurunan signifikan. Hal ini berdampak langsung pada kinerja ekonomi negara dan menunjukkan betapa pentingnya konsumsi dalam menjaga stabilitas ekonomi.

Pangsa pengeluaran untuk makanan adalah salah satu indikator penting dalam mengukur ketahanan pangan. Semakin besar persentase pengeluaran rumah tangga yang digunakan untuk makanan, semakin rentan ketahanan pangan suatu daerah. Hukum Engle, menjelaskan bahwa ketika pendapatan meningkat dan selera konsumen tetap, persentase pengeluaran untuk makanan akan cenderung menurun. Ini berarti bahwa ketika masyarakat suatu wilayah semakin sejahtera, persentase pengeluaran mereka untuk makanan akan menjadi lebih kecil.

Tercapainya ketahanan pangan merupakan salah satu tujuan utama dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, seperti yang tercantum dalam Sustainable Development Goals (SDGs). Hal ini juga menjadi fokus pemerintah Indonesia, yang telah mengambil langkah-langkah hukum untuk memperkuat ketahanan pangan. Misalnya, Peraturan Presiden Nomor 42 tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi.

2. Tren Pengeluaran Konsumsi Masyarakat Di Indonesia Dalam Beberapa Tahun Terakhir

Salvatore (2003), seperti yang dikutip oleh Dian Ariani (2014), mengartikan konsumsi sebagai penggunaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusiawi, yang mencakup barang-barang tahan lama seperti kendaraan dan perlengkapan, serta barang-barang tidak tahan lama seperti makanan dan pakaian. Selain itu, konsumsi juga melibatkan jasa, yang mencakup layanan abstrak seperti potong rambut dan perawatan kesehatan. Bahkan, pembelanjaan rumah tangga untuk pendidikan juga dianggap sebagai konsumsi jasa, menurut Mankiw (2003).

Tingkat konsumsi dapat diuraikan dalam tiga cara, yaitu dengan mempertimbangkan jenis dan jumlah barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga, dengan mengelompokkan penggunaan komoditas, atau dengan memperhatikan nilai (pengeluaran) dari komoditas yang dikonsumsi.

Pengeluaran rumah tangga terdiri dari dua kelompok utama, yaitu pengeluaran untuk makanan dan pengeluaran untuk barang bukan makanan. Ketika pendapatan terbatas, kebutuhan makanan menjadi prioritas, sehingga pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah, sebagian besar pendapatan mereka digunakan untuk membeli makanan. Namun, seiring dengan peningkatan pendapatan, pola pengeluaran akan bergeser, dengan penurunan proporsi pendapatan yang dihabiskan untuk makanan dan peningkatan proporsi yang digunakan untuk barang bukan makanan (BKP, 2010).

Contohnya, ketika pendapatan rumah tangga meningkat, mereka mungkin lebih cenderung untuk menghabiskan uang mereka untuk barang-barang tahan lama seperti mobil atau perabot rumah tangga daripada hanya untuk memenuhi kebutuhan makanan sehari-hari. Hal ini mencerminkan bagaimana tingkat pendapatan dapat memengaruhi pola konsumsi dalam masyarakat.

Secara nasional, rata-rata pengeluaran per kapita untuk konsumsi sebulan adalah sekitar 1.225.685 rupiah. Namun, ada variasi signifikan antara provinsi-provinsi di Indonesia. Sebagai contoh, Provinsi DKI Jakarta memiliki rata-rata pengeluaran tertinggi sebesar 2.257.991 rupiah, sementara Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki rata-rata pengeluaran terendah sebesar 794.361 rupiah. Selain itu, persentase rata-rata pengeluaran per kapita sebulan untuk makanan adalah sekitar 49,22 persen, menunjukkan bahwa pangsa pengeluaran pangan secara nasional kurang dari 50 persen.

Tabel 6.1: Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Sebulan menurut Provinsi dan Daerah Tempat Tinggal (rupiah), Maret 2020

Provinsi Province	Perkotaan Urban	Perdesaan Rural	Perkotaan+Perdesaan Urban+Rural
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	1 359 654	945 621	1 080 171
Sumatera Utara	1 283 256	935 035	1 124 253
Sumatera Barat	1 451 856	1 042 869	1 235 050
Riau	1 654 423	1 128 086	1 340 446
Jambi	1 374 805	1 007 645	1 126 690
Sumatera Selatan	1 222 262	902 712	1 022 030
Bengkulu	1 492 207	965 420	1 140 075
Lampung	1 230 555	859 793	974 424
Kepulauan Bangka Belitung	1 666 984	1 298 500	1 501 844
Kepulauan Riau	1 843 006	1 143 743	1 773 521
DKI Jakarta	2 257 991	-	2 257 991
Jawa Barat	1 430 785	977 655	1 324 960
Jawa Tengah	1 153 035	876 814	1 018 487
DI Yogyakarta	1 606 351	886 059	1 411 972
Jawa Timur	1 254 834	845 243	1 064 382
Banten	1 700 626	1 051 942	1 517 044
Bali	1 697 999	1 091 290	1 509 666
Nusa Tenggara Barat	1 211 683	975 497	1 089 764
Nusa Tenggara Timur	1 246 858	653 194	794 361
Kalimantan Barat	1 445 353	951 715	1 125 063
Kalimantan Tengah	1 545 959	1 189 942	1 333 318
Kalimantan Selatan	1 593 293	1 104 319	1 335 457
Kalimantan Timur	1 928 160	1 394 383	1 754 195
Kalimantan Utara	1 693 861	1 318 167	1 545 689
Sulawesi Utara	1 393 965	1 012 891	1 211 839
Sulawesi Tengah	1 338 594	906 790	1 035 777
Sulawesi Selatan	1 326 930	851 147	1 057 864
Sulawesi Tenggara	1 316 402	857 621	1 037 799
Gorontalo	1 344 334	866 580	1 068 282
Sulawesi Barat	1 185 661	803 556	893 761
Maluku	1 376 479	854 928	1 083 921
Maluku Utara	1 530 708	916 119	1 092 824
Papua Barat	1 637 600	1 217 784	1 395 014
Papua	1 710 012	1 149 703	1 309 714
Indonesia	1 455 637	933 695	1 225 685

Hal ini menggambarkan bahwa masyarakat Indonesia telah mengalami pergeseran pola konsumsi di mana pengeluaran untuk barang-barang bukan makanan semakin meningkat dibandingkan dengan pengeluaran untuk makanan. Perubahan ini dapat menjadi tanda peningkatan kesejahteraan dan diversifikasi konsumsi.

Sementara itu, data menunjukkan bahwa persentase pengeluaran per kapita setiap bulan untuk makanan mencapai 49,22 persen, sementara pengeluaran untuk barang dan jasa lainnya mencapai 50,78 persen. Ini secara jelas menunjukkan bahwa di tingkat nasional, pengeluaran untuk makanan mencakup 49,22 persen dari total pengeluaran. Fenomena ini

menggambarkan bahwa pengeluaran untuk barang dan jasa lainnya oleh penduduk Indonesia melebihi pengeluaran untuk makanan.

Dalam konteks wilayah, terdapat perbedaan antara daerah perkotaan dan perdesaan. Wilayah perdesaan memiliki pangsa pengeluaran untuk makanan sebesar 55,49 persen, yang menunjukkan tingkat ketahanan pangan yang lebih rendah dibandingkan dengan wilayah perkotaan, di mana pangsa pengeluaran untuk makanan adalah 46,05 persen (Badan Pusat Statistik).

Tabel 6.2: Persentase Pengeluaran per Kapita Sebulan untuk Makanan dan Bukan Makanan menurut Provinsi dan Daerah Tempat Tinggal, Maret 2020

Provinsi <i>Province</i>	Perkotaan <i>Urban</i>		Perdesaan <i>Rural</i>		Perkotaan+Perdesaan <i>Urban+Rural</i>	
	Makanan <i>Food</i>	Bukan Makanan <i>Non Food</i>	Makanan <i>Food</i>	Bukan Makanan <i>Non Food</i>	Makanan <i>Food</i>	Bukan Makanan <i>Non Food</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	48,19	51,81	59,96	40,04	55,14	44,86
Sumatera Utara	50,14	49,86	58,23	41,77	53,21	46,79
Sumatera Barat	48,12	51,88	57,26	42,74	52,21	47,79
Riau	45,02	54,98	54,62	45,38	49,84	50,16
Jambi	46,62	53,38	56,15	43,85	52,38	47,62
Sumatera Selatan	47,83	52,17	56,02	43,98	52,36	47,64
Bengkulu	42,68	57,32	56,15	43,85	50,30	49,70
Lampung	47,74	52,26	54,27	45,73	51,72	48,28
Kepulauan Bangka Belitung	48,75	51,25	55,45	44,55	51,34	48,66
Kepulauan Riau	44,49	55,51	54,49	45,51	45,13	54,87
DKI Jakarta	41,84	58,16	-	-	41,84	58,16
Jawa Barat	47,70	52,30	58,15	41,85	49,50	50,50
Jawa Tengah	46,34	53,66	52,01	47,99	48,72	51,28
DI Yogyakarta	39,17	60,83	50,14	49,86	41,03	58,97
Jawa Timur	45,69	54,31	54,66	45,34	49,00	51,00
Banten	47,62	52,38	59,11	40,89	49,88	50,12
Bali	42,70	57,30	51,72	48,28	44,72	55,28
Nusa Tenggara Barat	50,63	49,37	55,09	44,91	52,69	47,31
Nusa Tenggara Timur	46,04	53,96	61,50	38,50	55,73	44,27
Kalimantan Barat	46,15	53,85	56,69	43,31	51,93	48,07
Kalimantan Tengah	45,85	54,15	54,94	45,06	50,70	49,30
Kalimantan Selatan	47,02	52,98	55,28	44,72	50,62	49,38
Kalimantan Timur	42,78	57,22	51,57	48,43	45,06	54,94
Kalimantan Utara	45,21	54,79	53,88	46,12	48,13	51,87
Sulawesi Utara	45,17	54,83	53,98	46,02	48,69	51,31
Sulawesi Tengah	43,40	56,60	53,99	46,01	49,90	50,10
Sulawesi Selatan	44,99	55,01	53,35	46,65	48,79	51,21
Sulawesi Tenggara	43,46	56,54	54,16	45,84	48,83	51,17
Gorontalo	39,60	60,40	50,19	49,81	44,56	55,44
Sulawesi Barat	44,44	55,56	54,19	45,81	51,14	48,86
Maluku	45,11	54,89	54,12	45,88	49,09	50,91
Maluku Utara	43,28	56,72	53,18	46,82	49,19	50,81
Papua Barat	46,26	53,74	52,31	47,69	49,31	50,69
Papua	46,84	53,16	60,27	39,73	55,27	44,73
Indonesia	46,05	53,95	55,49	44,51	49,22	50,78

Ketika kita memeriksa provinsi-provinsi di Indonesia, Nusa Tenggara Timur merupakan provinsi dengan pangsa pengeluaran untuk makanan tertinggi, mencapai 55,73 persen. Di sisi lain, Provinsi DI Yogyakarta memiliki pangsa pengeluaran untuk makanan terendah, yaitu sebesar 41,03 persen. Meskipun Provinsi DI Yogyakarta memiliki tingkat ketahanan pangan tertinggi di Indonesia, masih ada 18 provinsi lain yang memiliki pangsa pengeluaran untuk makanan di bawah 50 persen. Ini mencakup provinsi-provinsi seperti DKI Jakarta, Gorontalo, Bali, Kalimantan Timur, dan lainnya.

Tabel 6.3: Pangsa Pengeluaran Pangan per Kapita Sebulan menurut Provinsi dan Daerah Tempat Tinggal, Maret 2020

Provinsi <i>Province</i>	Perkotaan <i>Urban</i>	Perdesaan <i>Rural</i>	Perkotaan+Perdesaan <i>Urban+Rural</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	48,19	59,96	55,14
Sumatera Utara	50,14	58,23	53,21
Sumatera Barat	48,12	57,26	52,21
Riau	45,02	54,62	49,84
Jambi	46,62	56,15	52,38
Sumatera Selatan	47,83	56,02	52,36
Bengkulu	42,68	56,15	50,30
Lampung	47,74	54,27	51,72
Kepulauan Bangka Belitung	48,75	55,45	51,34
Kepulauan Riau	44,49	54,49	45,13
DKI Jakarta	41,84	-	41,84
Jawa Barat	47,70	58,15	49,50
Jawa Tengah	46,34	52,01	48,72
DI Yogyakarta	39,17	50,14	41,03
Jawa Timur	45,69	54,66	49,00
Banten	47,62	59,11	49,88
Bali	42,70	51,72	44,72
Nusa Tenggara Barat	50,63	55,09	52,69
Nusa Tenggara Timur	46,04	61,50	55,73
Kalimantan Barat	46,15	56,69	51,93
Kalimantan Tengah	45,85	54,94	50,70
Kalimantan Selatan	47,02	55,28	50,62
Kalimantan Timur	42,78	51,57	45,06
Kalimantan Utara	45,21	53,88	48,13
Sulawesi Utara	45,17	53,98	48,69
Sulawesi Tengah	43,40	53,99	49,90
Sulawesi Selatan	44,99	53,35	48,79
Sulawesi Tenggara	43,46	54,16	48,83
Gorontalo	39,60	50,19	44,56
Sulawesi Barat	44,44	54,19	51,14
Maluku	45,11	54,12	49,09
Maluku Utara	43,28	53,18	49,19
Papua Barat	46,26	52,31	49,31
Papua	46,84	60,27	55,27
Indonesia	46,05	55,49	49,22

Bahkan di pulau atau gugusan pulau yang sama, terdapat variasi besar dalam pangsa pengeluaran untuk makanan. Sebagai contoh, di Pulau Sumatera, Provinsi Aceh memiliki pangsa pengeluaran untuk makanan tertinggi sebesar 55,14 persen, sementara Provinsi Kepulauan Riau memiliki pangsa pengeluaran untuk makanan terendah sebesar 45,13 persen. Ini menunjukkan bahwa ada perbedaan signifikan dalam tingkat ketahanan pangan di antara wilayah-wilayah di Indonesia, bahkan di dalam pulau atau gugusan pulau yang sama.

Sedangkan pada tahun 2021, secara nasional, rata-rata pengeluaran per kapita untuk konsumsi sebulan mencapai 1.264.950 rupiah. Dalam perbandingan dengan angka ini, ada 15 provinsi yang memiliki rata-rata pengeluaran di atas rata-rata nasional. Provinsi DKI Jakarta memiliki pengeluaran tertinggi dengan jumlah sebesar 2.336.429 rupiah, sedangkan Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki pengeluaran terendah dengan jumlah sekitar 840.359 rupiah dan Berdasarkan data Susenas September 2022 pada tingkat nasional, pengeluaran per kapita rata-rata per bulan untuk konsumsi makanan dan non-makanan mencapai 1.392.992 rupiah, mengalami kenaikan sebesar 8,71 persen dibandingkan dengan bulan September tahun 2021. Kenaikan ini diduga dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi nasional yang meningkat, penurunan tingkat pengangguran, dan dampak dari pencairan bantuan sosial.

Tren pengeluaran per kapita untuk konsumsi sebulan di Indonesia dari tahun 2020 hingga 2022 menunjukkan perubahan yang cukup signifikan. Pada tahun 2020, rata-rata pengeluaran per kapita bulanan sekitar 1.225.685 rupiah. Namun, dalam satu tahun berikutnya, yaitu pada tahun 2021, terjadi peningkatan yang nyata dalam pengeluaran, dengan rata-rata mencapai 1.264.950 rupiah. Hal ini mungkin dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi tertentu, meskipun ada variasi antar provinsi.

Kemudian, pada tahun 2022, berdasarkan data Susenas September, terjadi peningkatan yang lebih tajam dalam pengeluaran per kapita bulanan, dengan rata-rata mencapai 1.392.992 rupiah. Kenaikan ini mencapai 8,71 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Faktor-faktor seperti inflasi yang berpengaruh, pertumbuhan ekonomi yang positif, penurunan tingkat pengangguran, dan pencairan bantuan sosial mungkin berkontribusi pada kenaikan ini.

Dalam keseluruhan tren Pengeluaran Konsumsi Masyarakat Di Indonesia Dalam Beberapa Tahun Terakhir ini, terlihat bahwa pengeluaran per kapita untuk konsumsi mengalami peningkatan seiring berjalannya waktu. Meskipun masih ada variasi antar

provinsi, peningkatan ini mengindikasikan adanya perkembangan positif dalam kemampuan konsumsi masyarakat Indonesia dari tahun ke tahun.

Kesimpulannya adalah bahwa ketahanan pangan dapat bervariasi secara signifikan di berbagai provinsi di Indonesia, bahkan di dalam pulau atau gugusan pulau yang sama. Faktor-faktor seperti tingkat kesejahteraan ekonomi, pola konsumsi, dan ketersediaan sumber daya pangan lokal dapat memengaruhi pangsa pengeluaran pangan penduduk suatu wilayah. Informasi ini penting untuk perencanaan dan kebijakan pangan yang lebih efektif di berbagai wilayah Indonesia.

3. Pengeluaran Pemerintah Di Indonesia, Termasuk Alokasi Dana Untuk Sektor-Sektor Seperti Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur, Dan Program Sosial.

Pengeluaran pemerintah adalah salah satu aspek kunci dalam ekonomi suatu negara. Sebagai bagian dari kebijakan fiskal, pengeluaran pemerintah memainkan peran penting dalam membentuk kondisi ekonomi, mengelola sumber daya publik, dan memengaruhi kesejahteraan masyarakat. Pengeluaran pemerintah mencakup berbagai kegiatan dan program, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertahanan, serta berbagai layanan publik lainnya.

Dalam setiap negara, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan kesejahteraan warganya, mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan menjaga stabilitas ekonomi. Oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang pengeluaran pemerintah menjadi penting bagi para pengambil kebijakan, akademisi, dan masyarakat umum untuk memahami bagaimana penggunaan anggaran publik dapat memengaruhi kondisi ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

Pengeluaran pemerintah merujuk pada total belanja atau pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah suatu negara dalam suatu periode waktu tertentu. Pengeluaran ini mencakup semua bentuk belanja yang dikeluarkan oleh pemerintah, baik itu untuk membiayai program dan layanan publik, pembayaran gaji pegawai negeri, pengeluaran infrastruktur, serta pengeluaran untuk bidang-bidang lain yang menjadi tanggung jawab pemerintah.

Pengeluaran pemerintah dapat dibagi menjadi dua kategori utama:

1. **Pengeluaran Rutin:** Ini mencakup pengeluaran yang harus dilakukan secara teratur, seperti pembayaran gaji pegawai negeri, pengeluaran administratif, dan berbagai kebutuhan rutin lainnya yang diperlukan untuk menjalankan pemerintahan.

2. Pengeluaran Pembangunan dan Program: Ini mencakup pengeluaran untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, keamanan, dan program-program lain yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menjaga stabilitas negara.

Pengeluaran pemerintah dapat dibiayai melalui berbagai sumber, termasuk pendapatan pajak, pinjaman, hibah, dan sumber daya lainnya. Pengambilan keputusan yang bijaksana terkait dengan alokasi dan pengelolaan pengeluaran pemerintah adalah bagian penting dalam menjaga keseimbangan fiskal negara dan mencapai tujuan-tujuan ekonomi dan sosial yang telah ditetapkan.

Pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan dapat didorong oleh berbagai fasilitas publik yang disediakan oleh pemerintah. Pengeluaran pemerintah yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk mengelola perekonomian negara.

Perlu dicatat bahwa APBN telah mengalami berbagai perubahan struktural seiring berjalannya waktu. Pengeluaran pemerintah dalam sektor-sektor seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur pada dasarnya dapat dianggap sebagai investasi dalam pertumbuhan ekonomi. Namun, penting untuk diingat bahwa dampak pembangunan dalam ketiga sektor ini tidak akan terjadi secara instan; sebaliknya, efeknya akan terasa dalam beberapa periode waktu. Ada jeda waktu yang disebut "time lag" antara saat pemerintah mengeluarkan anggaran untuk pembangunan atau belanja negara dalam ketiga sektor tersebut dan saat masyarakat mulai merasakan dampak positifnya.

Contoh nya adalah ketika pemerintah memutuskan untuk membangun jaringan transportasi massal yang lebih efisien dalam sebuah kota. Proyek ini membutuhkan waktu beberapa tahun untuk diselesaikan, dan baru setelah selesai, masyarakat akan merasakan manfaatnya berupa waktu perjalanan yang lebih singkat, penghematan biaya, dan peningkatan aksesibilitas ke berbagai wilayah. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk memiliki pemahaman yang baik tentang "time lag" ini ketika merencanakan dan mengelola pengeluaran APBN dalam upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui investasi dalam pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Menurut Dumairy (1999), pemerintah memiliki beberapa fungsi utama, yaitu alokatif, distributif, stabilitif, dan dinamisatif. Fungsi-fungsi ini mengharuskan pemerintah untuk

menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Salah satu cara yang digunakan oleh pemerintah untuk melaksanakan fungsi-fungsi ini adalah melalui pengeluaran belanja pembangunan.

Belanja pembangunan merupakan bentuk pengeluaran pemerintah yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dalam pembangunan. Tujuan dari pembangunan ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Konkretnya, hal ini bisa tercermin dalam pemenuhan kebutuhan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Contohnya, suatu pemerintah dapat mengalokasikan anggaran untuk membangun rumah sakit, sekolah, dan jaringan jalan raya dalam upaya untuk meningkatkan kualitas hidup penduduknya.

Dengan demikian, pengeluaran pemerintah dalam bentuk belanja pembangunan, terutama dalam sektor kesehatan dan pendidikan, memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

3.1 Produk Domestik Bruto (PDB)

Produk Domestik Bruto (PDB) adalah salah satu indikator utama dalam ekonomi yang mengukur nilai total semua barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara selama periode waktu tertentu. PDB digunakan untuk menilai ukuran dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Ini mencakup semua kegiatan ekonomi yang terjadi dalam suatu wilayah, baik oleh penduduk negara itu sendiri maupun oleh orang asing yang melakukan produksi dalam negara tersebut.

Komponen utama dalam menghitung PDB adalah:

1. Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT): Ini mencakup pengeluaran rumah tangga untuk barang-barang dan jasa seperti makanan, pakaian, perumahan, pendidikan, dan rekreasi. Konsumsi rumah tangga adalah salah satu komponen terbesar dalam PDB karena mencerminkan tingkat konsumsi masyarakat.
2. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB): Ini mengukur investasi dalam pembelian barang-barang modal seperti mesin, peralatan, dan bangunan. PMTB mencerminkan tingkat investasi dalam ekonomi dan dapat memengaruhi pertumbuhan jangka panjang.
3. Ekspor Barang dan Jasa: Ini adalah nilai total barang dan jasa yang dijual oleh negara kepada luar negeri. Ekspor adalah sumber pendapatan bagi negara dan berkontribusi positif pada PDB.

4. Perubahan Inventori: Ini mencakup perubahan dalam persediaan barang yang belum terjual dalam suatu periode waktu. Jika perusahaan meningkatkan persediaan untuk memenuhi permintaan yang diperkirakan meningkat, perubahan inventori akan berkontribusi positif pada PDB.
5. Konsumsi Pemerintah (PK-P): Ini mencakup pengeluaran pemerintah untuk barang-barang dan jasa seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pertahanan. Konsumsi pemerintah adalah investasi dalam pelayanan publik dan infrastruktur.

Produk Domestik Bruto (PDB) dan pengeluaran pemerintah memiliki kaitan erat dalam konteks ekonomi suatu negara. Kaitan ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kontribusi Pengeluaran Pemerintah pada PDB: Salah satu komponen utama dalam perhitungan PDB adalah pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah mencakup semua belanja yang dilakukan oleh pemerintah, termasuk belanja konsumsi pemerintah (seperti pendidikan, kesehatan, dan layanan publik) serta belanja investasi pemerintah (seperti pembangunan infrastruktur). Oleh karena itu, pengeluaran pemerintah berkontribusi langsung pada nilai PDB suatu negara. Semakin besar pengeluaran pemerintah, semakin besar pula PDB.
2. Pengeluaran Pemerintah untuk Pertumbuhan Ekonomi: Pemerintah dapat menggunakan pengeluaran publik sebagai alat kebijakan fiskal untuk mengendalikan pertumbuhan ekonomi. Saat ekonomi mengalami perlambatan, pemerintah dapat meningkatkan pengeluaran untuk merangsang aktivitas ekonomi. Sebaliknya, jika inflasi meningkat, pemerintah dapat memotong pengeluaran untuk mengurangi tekanan inflasi. Dengan demikian, pengeluaran pemerintah dapat memengaruhi pertumbuhan PDB.
3. Pengeluaran Pemerintah untuk Kesejahteraan Masyarakat: Pengeluaran pemerintah juga berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Investasi pemerintah dalam sektor-sektor seperti pendidikan dan kesehatan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yang pada gilirannya dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Pemerintah juga dapat menggunakan pengeluaran untuk melindungi masyarakat dari dampak buruk ekonomi, seperti melalui program bantuan sosial.
4. Defisit Anggaran: Keseimbangan antara pengeluaran pemerintah dan pendapatan pemerintah (yang mencakup pajak dan penerimaan lainnya) memengaruhi defisit atau surplus anggaran. Jika pengeluaran pemerintah melebihi pendapatan, maka terjadi

defisit anggaran. Defisit anggaran dapat memerlukan pinjaman atau pembiayaan tambahan. Ini dapat berdampak pada stabilitas ekonomi dan nilai mata uang.

Jadi, PDB dan pengeluaran pemerintah adalah dua konsep ekonomi yang sangat terkait, dan pengeluaran pemerintah adalah salah satu faktor yang signifikan dalam perhitungan dan pengelolaan PDB suatu negara.



Gambar 6.1: Pertumbuhan PDB Beberapa Komponen Pengeluaran (q-to-q) (persen)

Dari Gambar 6.1 di atas, dapat diambil beberapa kesimpulan tentang struktur PDB (Produk Domestik Bruto) Indonesia berdasarkan komponen pengeluaran pada triwulan II-2023:

1. Komponen PK-RT (Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga) mencakup lebih dari separuh PDB Indonesia, yaitu sebesar 53,31 persen. Ini menunjukkan konsumsi rumah tangga memiliki peran yang sangat signifikan dalam perekonomian Indonesia.
2. Komponen PMTB (Pengeluaran Modal Tetap Bruto) berkontribusi sebesar 27,90 persen terhadap PDB. Hal ini mencerminkan investasi dalam pembentukan modal tetap yang penting untuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
3. Komponen Ekspor Barang dan Jasa memiliki peran yang cukup besar dalam PDB, mencapai 20,25 persen. Ekspor menjadi faktor penting dalam perekonomian Indonesia, membantu mendukung pertumbuhan.
4. Komponen PK-P (Pengeluaran Konsumsi Pemerintah) dan Komponen Perubahan Inventori juga memberikan kontribusi, masing-masing sebesar 7,51 persen dan 2,22 persen terhadap PDB.

5. Komponen PK-LNPRT (Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non-Profit) memiliki peran yang lebih kecil dalam PDB, sebesar 1,24 persen.
6. Komponen Impor Barang dan Jasa berperan sebagai faktor pengurang dalam PDB, mencapai 18,54 persen. Tingginya impor dapat mengurangi pertumbuhan ekonomi jika tidak diimbangi dengan pertumbuhan ekspor yang cukup kuat.

Keseluruhan, struktur PDB Indonesia pada triwulan II-2023 masih sangat didominasi oleh konsumsi rumah tangga (PK-RT), yang merupakan faktor utama dalam pertumbuhan ekonomi. Investasi (PMTB) dan ekspor (Ekspor Barang dan Jasa) juga berperan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Impor (Impor Barang dan Jasa) tetap menjadi faktor yang perlu diperhatikan karena dapat mempengaruhi keseimbangan perdagangan dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Dalam konteks struktur perekonomian Indonesia, tujuan utama adalah mensejahterakan rakyat. Melalui pengeluaran konsumsi rumah tangga yang tinggi, masyarakat dapat menikmati manfaat ekonomi dalam bentuk peningkatan kualitas hidup. Ketika rakyat memiliki daya beli yang kuat, hal ini dapat menciptakan permintaan lebih besar terhadap barang dan jasa, yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja.

Investasi dalam pembentukan modal tetap bruto (PMTB) juga berperan penting dalam mewujudkan tujuan ini. PMTB mencakup pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan fasilitas publik lainnya yang meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Misalnya, pembangunan jalan yang baik dapat mempermudah akses ke daerah pedesaan, yang pada gilirannya membuka peluang ekonomi baru.

Selain itu, ekspor barang dan jasa menjadi sumber pendapatan negara yang penting, yang dapat digunakan untuk membiayai program-program sosial dan pembangunan yang lebih lanjut. Pendapatan dari perdagangan internasional dapat digunakan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan dan pendidikan, serta infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi.

Meskipun demikian, manajemen impor barang dan jasa juga merupakan elemen penting dalam mencapai tujuan mensejahterakan rakyat. Mengendalikan impor dan menjaga neraca perdagangan yang seimbang adalah kunci untuk menjaga stabilitas ekonomi dan keberlanjutan pertumbuhan. Jadi, struktur perekonomian Indonesia mencerminkan upaya untuk mensejahterakan rakyat dengan meningkatkan konsumsi, investasi, dan perdagangan,

sambil menjaga keseimbangan dalam manajemen impor. Semua ini merupakan bagian dari strategi untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Berdasarkan data PDB menurut pengeluaran di bawah ini, kita simpulkan. Pertama, konsumsi rumah tangga memiliki peran dominan dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia, dengan mencakup lebih dari separuh PDB pada kedua triwulan yang diamati. Kedua, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah mengalami peningkatan signifikan pada Triw II-2023, menandakan keterlibatan aktif pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan pengeluaran. Ketiga, pembentukan modal tetap bruto relatif stabil, menunjukkan konsistensi dalam investasi ekonomi. Keempat, perubahan inventori memiliki kontribusi yang signifikan dalam PDB, meskipun angkanya fluktuatif. Terakhir, perbedaan antara ekspor dan impor barang dan jasa menghasilkan surplus perdagangan yang dapat berdampak positif pada PDB.

Adapun Dampak kebijakan pengeluaran pemerintah terhadap peningkatan kesejahteraan Masyarakat berdasarkan table di bawah ini adalah bahwa peningkatan pengeluaran konsumsi pemerintah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan permintaan agregat, menciptakan lapangan kerja baru, dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Selain itu, investasi dalam pembentukan modal tetap bruto dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pelaku bisnis dan meningkatkan daya saing ekonomi nasional. Stabilitas dalam perubahan inventori penting untuk menjaga keseimbangan ekonomi, sementara surplus perdagangan yang dihasilkan dari ekspor dan impor barang dan jasa dapat digunakan untuk membiayai pembangunan dalam negeri atau memperkuat cadangan devisa negara.

Dengan demikian, kebijakan pengeluaran pemerintah yang bijaksana, yang mencakup investasi dalam sektor-sektor kunci, dapat berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi, peningkatan lapangan kerja, dan stabilitas ekonomi.

Tabel 6.4: PDB Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran (triliun rupiah)

Komponen	Harga Berlaku		Harga Konstan 2010	
	Triw I-2023	Triw II-2023	Triw I-2023	Triw II-2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	2.682,0	2.786,1	1.582,2	1.631,0
2. Pengeluaran Konsumsi LNPR	59,5	65,0	35,4	38,4
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	268,2	392,7	158,2	223,6
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	1.476,5	1.458,1	929,3	917,6
5. Perubahan Inventori	121,8	116,0	62,7	59,3
6. Ekspor Barang dan Jasa	1.164,8	1.058,2	719,7	680,6
7. Dikurangi Impor Barang dan Jasa	1.006,0	969,0	586,8	567,5
Diskrepani Statistik ¹⁾	305,6	319,6	60,9	92,7
Produk Domestik Bruto (PDB)	5.072,4	5.226,7	2.961,6	3.075,7

Dari tabel di bawah ini, dapat diamati dampak kebijakan pengeluaran pemerintah terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai berikut:

1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga (Household Consumption Expenditure):
 - a. Laju pertumbuhan konsumsi rumahtangga dalam kisaran positif sepanjang tahun, yang mengindikasikan bahwa konsumsi rumahtangga meningkat secara keseluruhan.
 - b. Peningkatan ini dapat memberikan dampak positif pada kesejahteraan masyarakat, karena meningkatnya pengeluaran rumahtangga mencerminkan peningkatan daya beli dan kesejahteraan ekonomi individu.
2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (Government Consumption Expenditure):
 - a. Laju pertumbuhan konsumsi pemerintah mengalami fluktuasi yang signifikan sepanjang tahun, bahkan mencapai angka negatif dalam beberapa triwulan.
 - b. Ini bisa menjadi perhatian, karena konsumsi pemerintah termasuk dalam kebijakan fiskal yang dapat memengaruhi layanan publik dan program sosial. Angka negatif mungkin menunjukkan pemangkasan anggaran yang bisa berdampak negatif pada layanan publik yang diberikan oleh pemerintah.
3. Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (Gross Fixed Capital Formation):
 - a. Laju pertumbuhan pembentukan modal tetap memiliki fluktuasi yang signifikan dan variasi antara berbagai subsektor (misalnya, kendaraan dan produk kekayaan intelektual).

- b. Kebijakan yang mendukung pertumbuhan investasi dalam sektor-sektor seperti infrastruktur (bangunan dan mesin) dapat berkontribusi pada peningkatan produksi dan lapangan kerja, yang pada gilirannya dapat memengaruhi kesejahteraan masyarakat.
4. Ekspor dan Impor Barang dan Jasa (Exports and Imports of Goods and Services):
 - a. Laju pertumbuhan ekspor barang dan jasa mencerminkan bagaimana perekonomian Indonesia terhubung dengan pasar global.
 - b. Peningkatan ekspor dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan menciptakan peluang kerja, yang dapat berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat.
 - c. Meskipun impor barang mengalami fluktuasi, tetapi laju pertumbuhan impor barang non-migas memiliki dampak negatif pada neraca perdagangan dan mungkin perlu diatasi untuk menjaga stabilitas ekonomi.
 5. Produk Domestik Bruto (Gross Domestic Product - GDP):
 - a. Laju pertumbuhan PDB menunjukkan kinerja ekonomi secara keseluruhan.
 - b. Peningkatan PDB dapat mengindikasikan pertumbuhan ekonomi yang positif, tetapi untuk mengukur kesejahteraan masyarakat dengan lebih akurat, perlu dipertimbangkan indikator lain seperti tingkat pengangguran, distribusi pendapatan, dan akses ke layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan.

Tabel 6.5: Laju Pertumbuhan PDB menurut Pengeluaran (Persen), 2023

PDB Penggunaan (Seri 2010)	[Seri 2010] 4. Laju Pertumbuhan PDB menurut Pengeluaran (Persen)														
	Laju Pertumbuhan Kumulatif (c-to-c)					Laju Pertumbuhan Triwulanan Berantai (q-to-q)					Laju Pertumbuhan Triwulanan terhadap Triwulan yang S				
	2023					2023					2023				
	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Tahunan	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Tahunan	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Tahunan
1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	4.54	4.89	-	-	-	0.25	3.08	-	-	-	4.54	5.23	-	-	-
a. Makanan dan Minuman, Selain Restoran	3.47	3.66	-	-	-	0.35	3.23	-	-	-	3.47	3.84	-	-	-
b. Pakaian, Alas Kaki dan Jasa Perawatannya	3.98	5.52	-	-	-	1.93	6.04	-	-	-	3.98	7.02	-	-	-
c. Perumahan dan Perlengkapan Rumahtangga	2.78	3.29	-	-	-	0.49	1.67	-	-	-	2.78	3.80	-	-	-
d. Kesehatan dan Pendidikan	2.50	3.99	-	-	-	0.60	1.15	-	-	-	2.50	5.51	-	-	-
e. Transportasi dan Komunikasi	7.84	7.68	-	-	-	0.06	3.65	-	-	-	7.84	7.53	-	-	-
f. Restoran dan Hotel	5.86	6.32	-	-	-	-0.72	3.89	-	-	-	5.86	6.76	-	-	-
g. Lainnya	2.69	3.20	-	-	-	-0.12	2.14	-	-	-	2.69	3.71	-	-	-
2. Pengeluaran Konsumsi LNPR	6.17	7.43	-	-	-	-0.97	8.58	-	-	-	6.17	8.62	-	-	-
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	3.45	7.53	-	-	-	-45.66	41.30	-	-	-	3.45	10.62	-	-	-
a. Konsumsi Kolektif	2.97	12.93	-	-	-	-46.35	38.84	-	-	-	2.97	21.39	-	-	-
b. Konsumsi Individu	4.23	-0.01	-	-	-	-44.51	45.27	-	-	-	4.23	-2.74	-	-	-

4. Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	2.11	3.34	-	-	-	-3.72	-1.26	-	-	-	2.11	4.63	-	-	-
a. Bangunan	0.08	1.67	-	-	-	-1.24	-1.09	-	-	-	0.08	3.32	-	-	-
b. Mesin dan Perlengkapan	4.62	6.13	-	-	-	-10.72	1.05	-	-	-	4.62	7.67	-	-	-
c. Kendaraan	24.09	19.90	-	-	-	8.67	-11.40	-	-	-	24.09	15.50	-	-	-
d. Peralatan Lainnya	-5.26	-5.27	-	-	-	-6.59	-8.34	-	-	-	-5.26	-5.29	-	-	-
e. CBR	3.34	4.45	-	-	-	-22.79	-3.35	-	-	-	3.34	5.62	-	-	-
f. Produk Kekayaan Intelektual	5.06	7.34	-	-	-	-18.30	22.05	-	-	-	5.06	9.28	-	-	-
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Ekspor Barang dan Jasa	12.17	4.39	-	-	-	-4.98	-5.44	-	-	-	12.17	-2.75	-	-	-
a. Barang	8.48	1.16	-	-	-	-6.04	-6.31	-	-	-	8.48	-5.64	-	-	-
a.1. Barang Non-migas	7.58	0.50	-	-	-	-7.13	-6.65	-	-	-	7.58	-6.11	-	-	-
a.b. Barang migas	19.06	8.53	-	-	-	7.33	-2.64	-	-	-	19.06	-0.50	-	-	-
b. Jasa	86.52	61.49	-	-	-	9.36	4.71	-	-	-	86.52	43.14	-	-	-
7. Dikurangi Impor Barang dan Jasa	3.80	0.30	-	-	-	-6.02	-3.28	-	-	-	3.80	-3.08	-	-	-
a. Barang	0.37	-2.66	-	-	-	-6.98	-4.26	-	-	-	0.37	-5.63	-	-	-
a.1. Barang Non-migas	-0.65	-3.67	-	-	-	-6.08	-5.31	-	-	-	-0.65	-6.66	-	-	-
a.b. Barang migas	6.72	3.42	-	-	-	-11.83	1.82	-	-	-	6.72	0.36	-	-	-
b. Jasa	33.95	24.23	-	-	-	0.78	3.16	-	-	-	33.95	16.07	-	-	-
Diskrepansi Statistik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. PRODUK DOMESTIK BRUTO	5.04	5.11	-	-	-	-0.91	3.86	-	-	-	5.04	5.17	-	-	-

Adapun Kebijakan pengeluaran pemerintah memiliki dampak yang signifikan pada kesejahteraan masyarakat melalui berbagai sektor kunci, seperti pendidikan, kesehatan, dan program sosial. Dalam sektor pendidikan, peningkatan alokasi anggaran untuk infrastruktur pendidikan, pelatihan guru, dan penyediaan sumber belajar dapat meningkatkan akses dan kualitas pendidikan. Hal ini membantu mengurangi kesenjangan pendidikan dan meningkatkan peluang pekerjaan di masa depan, berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, dalam sektor kesehatan, pengeluaran pemerintah yang lebih besar dapat memberikan akses yang lebih baik ke layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas, mengurangi beban penyakit, dan meningkatkan umur harapan. Program sosial seperti bantuan sosial dan program penanggulangan kemiskinan juga membantu mengurangi ketimpangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan kelompok yang lebih rentan.

Oleh karena itu, pengeluaran pemerintah dalam sektor-sektor ini berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup dan peluang ekonomi yang lebih baik bagi seluruh masyarakat, menciptakan fondasi yang kokoh untuk pembangunan berkelanjutan. Monitoring dan evaluasi yang cermat terhadap dampak kebijakan pengeluaran pemerintah dalam sektor-sektor ini adalah kunci untuk memastikan pencapaian tujuan kesejahteraan masyarakat yang lebih luas.

C. RANGKUMAN

Pola pengeluaran yang terjadi di suatu negara mencerminkan situasi ekonomi dan sosial di wilayah tersebut. Data tentang bagaimana rumah tangga menghabiskan uang mereka dapat digunakan sebagai indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk. Seiring dengan

meningkatnya tingkat ekonomi penduduk, persentase dari pengeluaran total yang dikeluarkan untuk makanan cenderung menurun, menjadi salah satu tanda perkembangan ekonomi wilayah tersebut.

Selain faktor ekonomi, aspek sosial, ekonomi, dan budaya juga memengaruhi bagaimana masyarakat mengatur pola konsumsi mereka. Faktor-faktor ini menjadi dasar untuk perencanaan kebijakan pemerintah dan program-program yang disesuaikan dengan kondisi setempat. Mengungkapkan pola konsumsi di tingkat nasional membantu dalam menganalisis lebih rinci apa yang sebenarnya dikonsumsi oleh masyarakat.

Konsumsi biasanya berkontribusi secara signifikan pada Produk Domestik Bruto (PDB), sekitar 50-75%. Ini menjadikan konsumsi rumah tangga sebagai salah satu penentu utama fluktuasi ekonomi. Hubungan antara pengeluaran individu dan pendapatan mereka memiliki korelasi positif, yang berarti semakin tinggi pendapatan seseorang, semakin besar pengeluaran mereka.

Tren pengeluaran per kapita untuk konsumsi bulanan di Indonesia mengalami perubahan yang signifikan selama beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2020, rata-rata pengeluaran per kapita bulanan sekitar 1.225.685 rupiah. Namun, pada tahun 2021, pengeluaran ini meningkat menjadi sekitar 1.264.950 rupiah, mencerminkan perkembangan ekonomi yang positif, meskipun ada variasi antar provinsi.

Pada tahun 2022, terjadi lonjakan signifikan dalam pengeluaran per kapita bulanan, dengan rata-rata mencapai 1.392.992 rupiah, menunjukkan pertumbuhan sebesar 8,71% dibandingkan tahun sebelumnya. Faktor seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi yang positif, penurunan pengangguran, dan bantuan sosial dapat berkontribusi pada peningkatan ini.

Secara keseluruhan, tren pengeluaran konsumsi masyarakat di Indonesia menunjukkan peningkatan seiring berjalannya waktu, mencerminkan kemajuan ekonomi dan daya beli yang lebih tinggi. Pengeluaran pemerintah juga berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan melalui sektor-sektor seperti pendidikan, kesehatan, dan program sosial. Peningkatan alokasi anggaran dalam sektor-sektor ini membantu mengurangi ketimpangan, meningkatkan akses, dan menciptakan dasar yang kuat untuk pembangunan berkelanjutan. Evaluasi dan pemantauan yang teliti terhadap dampak kebijakan pengeluaran pemerintah sangat penting untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang lebih luas.

D. TUGAS/LATIHAN SOAL

Kasus : Program Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) di Indonesia

Program subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) di Indonesia telah menjadi topik yang penting dalam kebijakan ekonomi dan fiskal negara ini. Pemerintah Indonesia telah lama memberikan subsidi untuk harga BBM agar tetap terjangkau oleh masyarakat. Namun, program subsidi ini memiliki dampak yang signifikan pada pengeluaran konsumsi masyarakat dan anggaran pemerintah.

Sejak diperkenalkan pada awal 1970-an, program subsidi BBM telah menjadi bagian integral dari kebijakan energi Indonesia. Dalam beberapa dekade terakhir, harga BBM yang rendah telah memberikan manfaat bagi masyarakat dalam hal harga transportasi, termasuk kendaraan pribadi dan umum, serta kebutuhan sehari-hari yang bergantung pada bahan bakar minyak, seperti listrik dan transportasi barang.

Namun, manfaat dari subsidi BBM ini juga datang dengan konsekuensi yang cukup besar. Salah satu dampak yang paling terasa adalah beban fiskal bagi pemerintah. Anggaran pemerintah telah dialokasikan dalam jumlah yang signifikan untuk mengimbangi perbedaan antara harga internasional BBM dan harga jual dalam negeri yang lebih rendah. Ini dapat menguras anggaran pemerintah yang seharusnya dialokasikan untuk sektor-sektor lain yang juga memerlukan dana, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Selain itu, program subsidi BBM juga dapat memengaruhi perilaku konsumen. Harga BBM yang rendah dapat merangsang konsumsi bahan bakar fosil, yang pada gilirannya berdampak negatif pada lingkungan. Hal ini juga dapat menyebabkan ketergantungan yang lebih besar pada bahan bakar fosil, sementara banyak negara lain sedang beralih ke sumber energi yang lebih bersih dan berkelanjutan.

Di samping itu, subsidi BBM juga dapat menciptakan ketidaksetaraan dalam distribusi manfaat. Sebagian besar subsidi BBM diterima oleh mereka yang mampu, sementara mereka yang lebih miskin mungkin tidak memiliki akses yang sama ke kendaraan pribadi atau bahkan listrik. Dengan demikian, program subsidi BBM ini perlu dinilai ulang agar manfaatnya lebih merata dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah telah mencoba mengubah program subsidi BBM ini dengan berbagai kebijakan, seperti mengurangi jumlah subsidi yang diberikan, memperkenalkan kartu khusus untuk kelompok masyarakat tertentu, dan mendorong

penggunaan energi alternatif. Semua ini merupakan langkah-langkah penting untuk mengatasi tantangan yang dihadapi dalam menjaga keseimbangan antara harga BBM yang terjangkau dan fiskal yang sehat serta berkelanjutan.

Berdasarkan kasus tersebut, kerjakan tugas berikut!

1. Analisis dampak program subsidi BBM terhadap tren pengeluaran konsumsi masyarakat Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Bagaimana perubahan harga BBM yang disubsidi memengaruhi pola pengeluaran masyarakat, terutama dalam hal belanja untuk barang dan jasa lainnya?
2. Bagaimana alokasi anggaran pemerintah telah berubah dalam mengelola subsidi BBM selama beberapa tahun terakhir? Bagaimana hal ini mempengaruhi kebijakan pemerintah lainnya, seperti pembangunan infrastruktur atau program sosial?
3. Evaluasi dampak program subsidi BBM terhadap kesejahteraan masyarakat. Apa manfaat dan kerugian dari program ini dalam konteks peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia?